

## PENERAPAN COMMUNITY CRIME PREVENTION PADA OPERASI SATGAS INTELIJEN PERBANTUAN MADAGO RAYA BNPT DI POSO

Rezky Mediansyah<sup>1)</sup>, Supriadi<sup>2)</sup>, Mochamad Djatmiko<sup>3)</sup>

EProgram Magister Kajian Intelijen, Sekolah Tinggi Intelijen Negara  
email: ekymediansyah@gmail.com

<sup>2</sup>Program Magister Kajian Intelijen, Sekolah Tinggi Intelijen Negara  
Email: supriadiedilalo@yahoo.com

<sup>3</sup>Program Magister Kajian Intelijen, Sekolah Tinggi Intelijen Negara  
Email: koko.djatkiko1704@gmail.com

### ABSTRAK

Terorisme merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan oleh terorisme begitu besar sehingga masalah ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Dari berbagai sub permasalahan dalam terorisme di Indonesia, pergerakan aktifitas kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di wilayah Poso menjadi salah satu permasalahan yang cukup sulit ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena tantangan yang begitu besar dan adanya dukungan dari masyarakat yang membantu pergerakan mereka ini karena ancaman yang mereka terima. Hal ini menyebabkan masyarakat sebagai pihak yang dinilai paling dapat mengamankan diri mereka sendiri tidak berdaya. Oleh karena itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membentuk sebuah Satuan Tugas Intelijen Perbantuan Madago Raya yang memiliki tugas untuk melakukan penggalangan kepada masyarakat sehingga mereka dapat turut serta aktif untuk membantu aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum kepada kelompok MIT. Penelitian ini akan mengevaluasi proses penggalangan yang dilakukan melalui kerangka pikir konsep *Community Crime Prevention*.

**Kata Kunci:** Ancaman; Konsep *Community Crime Prevention*; Penggalangan.

### ABSTRACT

Terrorism is one problem faced by various countries in the world, including Indonesia. The losses caused by terrorism are so great that this issue needs special attention. From many various sub-problems in terrorism in Indonesia, the movement of Mujahidin Indonesia Timur (MIT) in the Poso area is one of the problems that is quite difficult to overcome. Because the challenges are so tough, and the community in Poso prefer to support the MIT movement because of their threats. Therefore, community as the side who is considered the most able to secure themselves to be powerless. Therefore, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme formed a Madago Raya Assistance Intelligence Task Force which has the task for recruiting the community so that they can actively participate in assisting law enforcement against MIT. This study will evaluate the process of fundraising that is carried out through the framework of the concept of *Community Crime Prevention*.

**Keywords:** Threat; *Community Crime Prevention*; Human Intelligence Recruitment.

### PENDAHULUAN

Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan yang diperhitungkan untuk menciptakan iklim ketakutan umum dalam suatu populasi dan dengan demikian menghasilkan tujuan politik tertentu (Britannica, 2006). Data dari *Global Terrorism Index* menjelaskan bahwa jumlah negara yang mengalami serangan terorisme pada tahun 2021 sebanyak

44 negara (Vision of Humanity, 2022). Secara kuantitas, dengan data pada tahun 2021 terdapat 5.226 serangan di seluruh dunia dengan rata-rata kematian adalah 1,6 korban jiwa per-serangan. Data ini menunjukkan betapa berbahaya dan mematikkannya sebuah serangan terorisme. Posisi Indonesia di *Global Terrorism Index 2022* berada pada posisi 24 sebagai negara yang memiliki dampak paling

parah akibat serangan terorisme (dengan skor 5.500 dari skala 10.000) (Vision of Humanity, 2022). Posisi Indonesia pada tahun 2021 turun empat peringkat dari tahun sebelumnya dimana Indonesia mendapatkan peringkat 20.

Terorisme internasional didefinisikan oleh FBI sebagai kekerasan, tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok yang terinspirasi oleh dan/atau terkait dengan organisasi atau negara teroris asing yang ditunjuk (disponsori negara). Sedangkan untuk terorisme domestik didefinisikan oleh FBI sebagai sebuah kekerasan/tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok untuk tujuan ideologis lebih lanjut yang berasal dari pengaruh domestik, seperti yang bersifat politik, agama, sosial, ras, atau lingkungan.

Berdasarkan data yang dikelola oleh Lab45 (lembaga kajian tentang keamanan) pada 2021, rentang antara tahun 2000 hingga 2021 telah terjadi sejumlah 552 aksi teror di Indonesia (Widjajanto, 2021). Berdasar masa kepemimpinan presiden, aksi serangan terorisme dengan jumlah tertinggi tercatat pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan target sasaran terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: individu atau aset pribadi, tokoh atau tempat keagamaan, dan aparat kepolisian. Menurut laporan tersebut, serangan yang terjadi mulai dari tahun 2000 hingga 2015 cenderung menurun. Namun, serangan kembali naik mulai tahun 2016. Dengan serangan teror mayoritas dilakukan oleh Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al Qaeda dan Mujahidin Indonesia timur yang berafiliasi dengan ISIS.

Dari berbagai permasalahan, salah satu yang menarik perhatian adalah aktivitas teror yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dihadapi dengan Operasi Tinombala yang sekarang sudah diubah dengan Operasi Madago Raya (DPR RI, 2021). Berdasarkan laporan

dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina (PUSAD), dijelaskan bahwa MIT ini muncul pasca adanya jaringan teror yang masuk ke wilayah poso semenjak adanya konflik komunal antara muslim dan Kristen yang dimulai dari tahun 1998 (PUSAD, 2019).

Konflik yang terjadi di Poso merupakan dampak dari transisi demokrasi yang terjadi pada era reformasi tahun 1998 yang memunculkan berbagai konflik terjadi di Indonesia termasuk di Poso, Sulawesi Tengah (PUSAD, 2019). Konflik Poso dimulai pecahnya rangkaian kerusuhan yang bermula di malam Natal 1998 yang dipicu atas terjadinya penusukan dari kelompok pemuda beragama Kristen ke pemuda Islam. Konflik yang pada awalnya relatif kecil ini membesar dengan kabar-kabar yang bernada dasar ideologis keagamaan sehingga memancing berbagai kelompok-kelompok Islam untuk ikut campur di konflik tersebut. Adapun kelompok-kelompok yang masuk ke konflik tersebut antara lain adalah Darul Islam, Jamaah Islamiyah, Mujahidin Komite Aksi Penanggulangan Akibat Krisis, berikut sekalian dengan kelompok-kelompok Islam radikal yang lebih kecil.

Konflik di wilayah Poso tersebut pada perkembangannya diwarnai oleh para veteran perang Afganistan dan pelaku konflik di Filipina. Mereka yang terjun langsung ke Poso juga melakukan rekrutmen dan memberikan pelatihan kepada pemuda-pemuda asli Poso untuk turut memperkuat 'pembelaan' mereka terhadap kelompok Islam yang dinarasikan sedang tertindas. Walaupun konflik ini pernah coba diredam dengan diadakannya Perjanjian Malino, namun nyatanya konflik ini tak pernah benar-benar kunjung reda karena tetap dianggap merendahkan kelompok Islam dan tidak menyelesaikan akar masalah. Sehingga, kelompok Islam radikal di Poso tetap melakukan perampokan sekaligus memperluas operasi dan jumlah anggota.

Operasi kelompok Islam radikal ini terus bereskalasi secara signifikan hingga

pada medio 2012-2014 muncul serangan yang cukup masif kepada golongan non-muslim dan polisi yang dilakukan oleh kelompok yang mengidentifikasi dengan nama Jamaah Anshorut Tauhid yang kemudian bertransformasi menjadi Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kelompok ini berhasil menimbulkan suasana teror yang begitu besar dengan berbagai upaya. Kelompok ini juga memperkuat diri dengan terus melakukan rekrutmen dan melakukan latihan militer yang diikuti berbagai kelompok militer terlebih ketika Sabar Subagyo alias Daeng Koro yang merupakan mantan anggota Kopashanda (Komando Pasukan Sandhi Yudha) turut bergabung menjadi pelatih dalam kelompok ini hingga mampu menebarkan ancaman teror di wilayah Poso secara begitu masif. Upaya penegakan hukum terhadap kelompok MIT pun dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan nama awal Operasi Camar Maleo yang bertransformasi menjadi Operasi Tinombala dan terakhir bertransformasi dengan sebutan Operasi Madago Raya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Sub Direktorat Intelijen BNPT, ditemukan bahwa pada tahun 2020 MIT menjadi kelompok paling aktif melakukan serangan terorisme (Subdit Intelijen BNPT, 2021). Pada tahun 2020 MIT melakukan serangan sebanyak sembilan kali dengan modus perampokan, pembunuhan, penyerangan terhadap penegak hukum, bahkan penyembelihan. Salah satu serangan MIT yang menarik perhatian khalayak ramai terjadi di Desa Lebantongoa Kabupaten Sigi pada 27 November 2020 yang menyebabkan empat orang meninggal dan tujuh bangunan rusak. Operasi penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah sudah berjalan lama dan berupaya untuk sesegera mungkin menangkap DPO MIT yang dulu dipimpin oleh Ali Kalora telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Masyarakat banyak yang menjadi korban dengan berbagai metode yang menakutkan seperti penembakan

bahkan penyembelihan (BNPT, 2022). Operasi ini tergolong sulit dan rumit karena berbagai faktor seperti kondisi geografis serta adanya faktor masyarakat yang takut untuk melaporkan berbagai pergerakan jaringan MIT yang mengirim sinyal ancaman bagi masyarakat yang membantu operasi ini.

Operasi penegakkan hukum yang dinamai Operasi Madago Raya atau dikenal juga dengan Operasi Tinombala 2021 adalah operasi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Poso Kabupaten Sulawesi Tengah sejak tahun 2016 (BNPT, 2019). Tujuannya adalah untuk menaklukkan dan mengalahkan Jaringan Mujahidin Indonesia Timur.

Salah satu kendala dalam operasi penegakan hukum terhadap Kelompok Mujahidin Indonesia Timur adalah minimnya dukungan masyarakat kepada aparat dalam bentuk pemberian informasi (IPAC, 2021). MIT dalam laporan yang ditulis oleh *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) menyatakan bahwa kekuatan utama dari MIT adalah kebrutalan yang mereka lakukan. Dengan jumlah yang sedikit, kebrutalan yang mereka lakukan dapat menutup kekurangan mereka dari segi jumlah anggota. Salah satu bentuk kekejaman dan kebrutalan yang mereka lakukan yang sangat membuat masyarakat takut adalah tindakan pemenggalan yang tidak segan-segan mereka lakukan terhadap kelompok masyarakat yang mereka temui atau enggan bekerja sama dengan mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Foster, ketiadaan kontrol sosial informal sangat berpengaruh pada tingginya tingkat kejahatan di suatu area (Foster, 1995). Foster dalam risetnya di Inggris menyebutkan bahwa bila suatu masyarakat yang toleran dan membiarkan kejahatan terus terjadi pada wilayah dimana dia tinggal, maka hal tersebut akan berpengaruh pada tingginya tingkat kejahatan di wilayah tersebut. Namun, seringkali masyarakat yang ingin

melakukan perlawanan terhadap kejahatan tidak mengetahui bagaimana melakukan perlawanan. Selain itu, rasa takut terhadap kejahatan atau yang biasanya disebut sebagai *fear of crime* membuat masyarakat semakin tidak berdaya untuk merespon. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa agar masyarakat turut serta dalam pengamanan komunitas, maka kontrol sosial perlu ditingkatkan. Peningkatan kontrol sosial yang akan dibuat dengan melaksanakan pembangunan *Community Crime Prevention* (CCP) yang tepat. Pembangunan *Community Crime Prevention* yang tepat akan dapat membantu pembangunan kontrol sosial yang kuat.

Definisi kontrol sosial pertama kali dikemukakan oleh Edward Ross pada tahun 1901. Namun, menurut Ross, frasa ini dicetuskan oleh Herbert Spencer beberapa tahun sebelumnya (Hardy, 2016). Menurut Ross, segala persoalan yang berkaitan dengan istilah ini harus berkaitan dengan tatanan sosial. Rose mendefinisikan kontrol sosial sebagai penciptaan dan reproduksi ketertiban dalam masyarakat. Menurut Ross, kontrol sosial merupakan bentuk kepentingan manajemen dalam menjaga kestabilan masyarakatnya.

Upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dalam konteks individu atau kelompok. Apa pun yang perlu dilindungi baik di tingkat makro maupun mikro harus diperhitungkan secara spesifik dan jelas. Pencegahan kejahatan yang dapat dilakukan oleh kelompok antara lain adalah perlindungan melalui pengawasan antar anggota kelompok masyarakat. Pencegahan ini sangat berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat bekerja sama untuk mencegah kejahatan di wilayahnya. Perlindungan ini sangat penting untuk menjaga ketahanan masyarakat. Pencegahan ini disebut sebagai *Community Crime Prevention*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh Jacinta M. Gau pada tahun 2016, ditemukan fakta bahwa Efikasi kolektif biasanya diukur sebagai gabungan dari kohesi sosial dan kontrol informal; namun, masih banyak komponen yang harus dilakukan sehubungan dengan pengukuran kontrol informal dan pemodelan hubungan antara kohesi dan kontrol sosial (Gau, 2014). Studi yang dilakukan oleh Gau membahas masalah efikasi kolektif dengan menggunakan beberapa operasionalisasi kontrol sosial informal. Hasil menunjukkan bahwa responden mengandalkan kemampuan mereka untuk memanggil polisi sebagai metode, di mana mereka melakukan kontrol informal atas wilayah tempat tinggal mereka. Namun, hal tersebut baru dapat dilakukan bila kohesi sosial di wilayah tempat penelitian Gau sudah cukup baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol sosial penting untuk menjaga stabilitas keamanan suatu wilayah. Hal ini sesuai dengan riset ini yang ingin meningkatkan kontrol sosial melalui penerapan konsep *Community Crime Prevention*.

Untuk itu, pada tahun 2021 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membentuk satuan tugas yang diberi nama sebagai Satuan Tugas Intelijen Perbantuan Madago Raya sebagai salah satu implementasi dari strategi pencegahan terorisme di Indonesia yaitu Kesiapsiagaan Nasional. Satgas yang dibentuk diharapkan mampu melakukan operasi dan program penggalangan kepada masyarakat agar mereka bersedia turut membantu aparat untuk menyukseskan Operasi Madago Raya. Melalui operasi ini, diharapkan masyarakat semakin berani untuk terlibat dalam penanggulangan Kelompok MIT yang ditakuti oleh masyarakat Poso.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah Mengevaluasi penggunaan teknik penggalangan intelijen kepada masyarakat melalui kerangka konsep *Community Crime Prevention* yang dilakukan oleh Satuan Tugas Intelijen Perbantuan Madago

Raya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap proses penerapan *Community Crime Prevention* melalui penggalangan intelijen di wilayah Poso. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi proses penggalangan yang dilakukan oleh BNPT terhadap masyarakat Poso melalui kerangka *Community Crime Prevention*. Dengan begitu, diharapkan akan didapatkan sebuah masukan mengenai penerapan pembangunan *Community Crime Prevention* yang lebih baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi wilayah Poso baik dari segi situasional ancaman maupun dari segi kesiapan masyarakat. Pendekatan ini lebih baik penulis gunakan untuk menjelaskan kompleksitas fenomena terorisme di wilayah Poso. Sumber data dalam penelitian ini antara lain adalah: (1) Anggota Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT (Kasatgas dan Analis Intelijen); (2) Anggota Satgas Tinombala (Kasi Intel Ops); (3) Anggota Satgas Madago Raya (Danposko Madago Raya); (4) Dokumen terkait Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara para pelaksana dan konseptor operasi serta studi dokumen operasi. Wawancara dilakukan kepada Kasatgas Intelijen Perbantuan Madago Raya, Analis Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya, Kasi Intelops Satgas Tinombala, dan Danposko Satgas Madago Raya. Selain itu, penulis juga akan melakukan studi dokumen terkait Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya. Teknik analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data sesuai dengan teori. Lalu, data-data tersebut diverifikasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas

data yang kemudian akan dianalisis dengan masing-masing teori yang sudah disebutkan sebelumnya. Tahapan akhir di dalam analisis data kualitatif menurut Spradley adalah analisis tema kultural. Keabsahan data akan dilakukan dengan metode triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kendala Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Operasi Madago Raya**

*Community Crime Prevention* (pencegahan kejahatan berbasis masyarakat) adalah pendekatan pencegahan kejahatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau, melaporkan, dan mengatasi permasalahan kejahatan di lingkungannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat dan meningkatkan rasa keamanan di lingkungan sekitar.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan dari Whitzman yang menjelaskan bahwa *Community Crime Prevention* adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah keamanan di lingkungannya. Pendekatan ini menekankan pada kerja sama dan keterlibatan aktif antara masyarakat, pihak keamanan, dan pemerintah dalam mencegah kejahatan.

Whitzman menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mencegah kejahatan. Menurutnya, masyarakat harus diberdayakan dan dilibatkan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan di lingkungannya. Masyarakat harus dipandang sebagai mitra yang setara dalam upaya mencegah kejahatan, bukan sebagai pihak yang hanya dianggap sebagai sumber masalah.

Selain itu, Whitzman juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam upaya pencegahan kejahatan. Pendekatan *Community Crime Prevention* harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat agar dapat efektif dalam mencegah kejahatan. Dalam hal ini,

juga dilakukan analisis kendala mengapa masyarakat Poso tidak pro aktif untuk terlibat dalam Operasi Madago Raya.

Dalam Operasi Madago Raya, terdapat kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu Satgas Intelijen. Kendala tersebut antara lain adalah kendala ekonomi yang menyebabkan masyarakat sulit untuk menyediakan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi dalam operasi. Selain itu, ancaman dari kelompok MIT juga menjadi kendala utama yang membuat masyarakat takut dan enggan berperan aktif.

Kendala ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam operasi Madago Raya. Terdapat sejumlah masyarakat di Poso yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga sulit untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan waktu dan biaya diluar kegiatan primer mereka.

Banyak warga Poso yang bekerja sebagai petani atau buruh harian dengan penghasilan yang minim. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mengeluarkan biaya tambahan seperti transportasi dan makanan selama berpartisipasi dalam operasi Madago Raya. Selain itu, banyak warga Poso yang harus memprioritaskan penghasilan mereka untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga, sehingga sulit untuk memprioritaskan partisipasi dalam operasi Madago Raya.

Kehadiran kelompok MIT di sekitar wilayah Poso telah memberikan dampak buruk pada kondisi ekonomi masyarakat setempat. Aktivitas kelompok tersebut seringkali mengganggu jalannya aktivitas perdagangan dan usaha masyarakat. Selain itu, adanya ancaman dan ketakutan terhadap keamanan dan keselamatan juga membuat masyarakat enggan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Beberapa masyarakat bahkan terpaksa keluar dari wilayah

tersebut karena sulitnya mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam menggalang partisipasi masyarakat dalam operasi Madago Raya.

Namun, ancaman yang paling dominan dan mengancam keselamatan masyarakat berasal dari kelompok MIT itu sendiri. Ancaman yang dilancarkan oleh kelompok ini sangat bervariasi, mulai dari ancaman terhadap harta benda, perlukaan fisik, hingga ancaman pembunuhan. Ancaman yang paling traumatik dan mengerikan bagi masyarakat adalah pemenggalan yang sering dilakukan oleh kelompok MIT.

Ancaman dari kelompok MIT terhadap masyarakat Poso sangat nyata dan meresahkan. Masyarakat Poso dihadapkan pada ancaman yang dapat berupa kekerasan fisik, penganiayaan, penculikan, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Kelompok MIT juga kerap kali melakukan aksi bom bunuh diri yang membuat masyarakat semakin takut dan tidak aman.

Ancaman yang paling membuat traumatik masyarakat adalah pemenggalan yang dilakukan oleh kelompok MIT. Hal ini seringkali terjadi pada masyarakat yang dianggap bekerja sama dengan aparat keamanan atau tidak setuju dengan ideologi kelompok MIT. Pemenggalan tersebut menyebabkan trauma berkepanjangan pada masyarakat dan menimbulkan ketakutan yang sangat dalam.

### **Upaya Penggalangan Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT**

Dalam praktiknya, pendekatan *Community Crime Prevention* dapat membantu memperkuat dan memperluas kontrol sosial dalam lingkungan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam *Community Crime Prevention* dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, sehingga memperkuat kontrol sosial dan mengurangi kemungkinan

terjadinya kejahatan di lingkungan tersebut. Untuk poin-poin teori yang diberikan oleh Whitzman, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya antara lain adalah:

a. *Defining The Problems: The Prevalence of Violence and Insecurity*

- 1) Pihak Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT mengidentifikasi bahwa adanya kekerasan dan ketidakamanan di wilayah Poso telah menjadi masalah yang serius.
- 2) Pengalaman masyarakat Poso yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan oleh DPO MIT memperburuk situasi tersebut.
- 3) Hal ini memicu rasa takut dan tidak aman di kalangan masyarakat Poso dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

b. *Analysing the Problem: Causes, Consequences, and Prevention of Violence*

- 1) Pihak Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT melakukan analisis penyebab kekerasan dan kejahatan di Poso.
- 2) Penyebabnya antara lain: radikalisme, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kerja sama dalam menjaga keamanan wilayah.
- 3) Konsekuensi dari kekerasan dan ketidakamanan ini adalah hilangnya rasa percaya diri dan ketakutan di kalangan masyarakat Poso.
- 4) Solusi yang dapat dilakukan adalah menggalang kerja sama masyarakat dalam mencegah dan mengurangi kekerasan, meningkatkan tingkat pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerja sama dalam menjaga keamanan wilayah.

c. *Coordinated Community Safety*

- 1) Pihak Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT melakukan penggalangan dan pendekatan terhadap masyarakat Poso melalui forum-forum diskusi dan pertemuan dengan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemuda.
- 2) Pihak Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT juga melakukan kampanye melalui media sosial dan langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerja sama dalam menjaga keamanan wilayah.
- 3) Pihak Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT juga memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang kesadaran keamanan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat yang rawan menjadi korban kekerasan dan kejahatan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia.

d. *Process of Community Safety Planning:*

- 1) Untuk memulai penggalangan masyarakat, Satgas harus mengembangkan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari kelompok perkebunan.
- 2) Dalam upaya penggalangan masyarakat, Satgas harus menggunakan alat diagnostik untuk memahami secara lebih mendalam masalah keamanan yang dihadapi oleh masyarakat di Poso. Dengan begitu, Satgas dapat merancang program yang tepat sasaran dan efektif. Tanpa adanya alat diagnostik dalam pelaksanaan program ini, dikhawatirkan program akan berjalan secara serampangan. Apa yang dilakukan satgas sudah cukup baik melalui penggunaan metode ini.
- 3) Setelah memahami masalah dan membangun kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat,

Satgas harus merancang rencana kerja berdasarkan kerangka logika. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah keamanan di Poso, serta jadwal dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing kelompok yang terlibat.

- 4) Setelah merancang rencana kerja, Satgas harus mengimplementasikannya secara terstruktur dan konsisten. Selama proses implementasi, Satgas harus secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi program untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- 5) Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam upaya penggalangan masyarakat, Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program.
- 6) Setelah mengevaluasi program, Satgas harus menentukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Selain itu, Satgas juga harus memastikan bahwa program terus dijaga dan dipertahankan dengan baik, dan bahkan dapat diintegrasikan ke dalam program-program keamanan yang lebih besar. Tahapan ini belum berhasil dilakukan dalam operasi tersebut karena memang operasi ini berjalan sangat singkat sehingga upaya perbaikan operasi sangatlah kurang untuk dilaksanakan.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat berbagai macam jenis kendala yang dihadapi masyarakat bila mereka turut serta berpartisipasi dalam Operasi Madago Raya. Jenis kendala tersebut adalah kendala ekonomi dan ancaman.

Terkait upaya penggalangan yang dilakukan oleh Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT terkait ancaman yang

dihadapi masyarakat dalam rangka pelibatan dalam Operasi Madago Raya berdasar pendekatan *Community Crime Prevention* terlihat bahwa Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT sudah melakukan langkah-langkah penggalangan yang baik dan tersistematis. Untuk menghadapi masalah utama yaitu keberadaan masyarakat yang menjadi simpatisan sekaligus menjadi informan kelompok DPO MIT, Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT memadukan penggunaan teknik penggalangan umum untuk memastikan bahwa perlindungan dapat diberikan kepada masyarakat yang bersedia membantu operasi Madago Raya.

Hal ini dibuktikan dengan upaya penggalangan yang dilakukan dengan pendefinisian masalah, melakukan assesmen mengenai siapa saja yang dapat dilibatkan dalam operasi ini, melakukan assesmen mengenai hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah yang ada di lapangan, menyiapkan infrastruktur dan sistem untuk menyelesaikan masalah, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

Salah satu bentuk upaya penggalangan yang baik dilakukan oleh satgas ini adalah menyadarkan masyarakat bahwa melakukan perlawanan merupakan salah satu hal yang paling baik dilakukan. Persepsi bahwa membiarkan MIT terus menebarkan rasa takut hanya akan semakin memperlama penderitaan yang mereka alami akan meningkatkan kesadaran mereka untuk melawan. Upaya tersebut yang dibarengi dengan memberikan perlindungan keamanan saat bersedia bekerjasama akan menjadi pemicu positif untuk meningkatkan tingkat kerjasama masyarakat Poso kepada Satgas Madago Raya.

Berdasarkan pelaksanaan yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa penggunaan CCP dan penggalangan untuk membuat masyarakat Poso agar bersedia mendukung operasi Madago Raya sangatlah rumit dan memerlukan sumberdaya yang besar.

Namun, Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya bersedia melakukan setiap Langkah yang diperlukan untuk meminimalisasi potensi kegagalan sekaligus sebagai upaya menjaga keamanan masyarakat.

Saran terkait hasil temuan data terkait ancaman yang diterima oleh masyarakat dengan upaya penggalangan yang dilakukan oleh Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT adalah:

1. Penggunaan konsep *Community Crime Prevention* dalam operasi pengamanan dimana peran masyarakat penting dalam operasi tersebut sangatlah baik meskipun dalam pelaksanaannya akan lebih kompleks dan memerlukan sumber daya yang besar.
2. Perlu dilakukan penilaian atas efektivitas program ini untuk dapat mengetahui dampak program upaya penggalangan yang dilakukan Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT terhadap keberanian masyarakat untuk berpartisipasi dalam operasi Madago Raya.
3. Perlu dilakukan upaya perawatan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT di wilayah Poso. Hal ini penting terutama untuk merawat kemampuan deteksi dini yang dimiliki oleh masyarakat Poso atas potensi radikalisme dan terorisme di wilayah Poso di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arthasastra, K. (2013). *King, Governance, and Law in Ancient India*. Oxford: Oxford University Press.
- Berger, P. (2008). *Invitation to Sociology: A Humanistic Approach*. New York: Anchorbook.
- BNPT. (2019). *Modul Pengetahuan Dasar Ancaman dan Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Bogor: BNPT.
- BNPT, D. P. (2022). *Laporan Akhir Tahun 2021 Direktorat Penindakan BNPT*. Bogor: Direktorat Penindakan BNPT.
- BPS Kabupaten Poso. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Poso*. Poso: Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso.
- Britannica. (2006). *Britannica Concise Encyclopedia*. London: Encyclopaedia Britannica Inc.
- Cohen, L. E. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 588-608.
- Community Crime Prevention Task Force. (2015). *Community Crime Prevention Strategic Plan*. Langley: City of Langley.
- Dilla, N. S. (2018). *Pencegahan kejahatan berbasis komunitas pada permukiman yang banyak rumah kontrak dan rumah mewah*. Depok: Universitas Indonesia.
- Djatmiko, M. (2020). *Intelijen dan Bisnis*. Jakarta: Forum Kajian Antropologi Indonesia.
- DPR RI. (2011). *UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (1 ed.)*. Jakarta: DPR RI.
- DPR RI. (2011). *UU Republik Indonesia Nomor 17 Tentang Intelijen Negara*. Jakarta: DPR RI.
- DPR RI. (2018). *UU No. 5 Tahun 2018*. Jakarta: DPR RI.
- DPR RI. (2021). *Kebijakan Pemerintah Terkait Terorisme di Poso*. Jakarta: DPR RI.
- Dragolov, G. (2016). *Social Cohesion in the Western World: What Holds Societies Together: Insights from the Social Cohesion Radar*. New York: Springer.
- FBI. (2018). *Strategic Intelligence Assessment and Data on Domestic Terrorism*. New York: FBI.
- Felson, M., & Clarke, V. M. (1998). *Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention*. London: Research, Development and Statistics Directorate.

- Foster, J. (1995). Informal Social Control and Community Crime Prevention. *British Journal of Criminology*, 563-583.
- Gau, J. M. (2014). Unpacking collective efficacy: the relationship between social cohesion and informal social control. *A Critical Journal of Crime, Law and Society*, 210-225.
- Gilling, D. (1997). *Crime Prevention: Theory, Policy, and Politic*. London: Routledge.
- Gilling, D. (1997). *Crime Prevention: Theory, Policy, and Politics*. New York: Routledge.
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2022). *Membentuk Manusia Perang Pikiran*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Hardy, M. (2016). *Governing Risk: Care and Control in Contemporary Social Work*. Oxford: Palgrave Macmillan UK.
- IPAC. (2021). *The Decline Of Isis In Indonesia And The Emergence Of New Cells*. Jakarta: IPAC.
- Iqbal, M. (2011). Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah Pengembangan Jembatan Surabaya-Madura (Aplikasi Community Development Crime Prevention). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 228-243.
- Kriendler, J. (2006). *NATO Intelligence and Early Warning*. Washington: Conflict Studies Research Center.
- Lauglin, E. M. (2001). *The Sage Dictionary of Criminology*. New Delhi: Sage Publication.
- NCPI. (2001). *Understanding Crime Prevention*. New Delhi: Butterworth Heinemann.
- Nugroho, K. (2014). *Pencegahan kejahatan berbasis komunitas terhadap terorisme oleh masyarakat desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah*. Depok: Universitas Indonesia.
- PUSAD. (2019). *Duapuluh Tahun Konflik Poso, Sulawesi Tengah : Deradikalisasi, Rekonsiliasi, dan Upaya-upaya Binadamai*. Jakarta: Universitas Paramadina.
- Pusat Pendidikan Intelkam. (2022). *Bahan Ajar Penggalangan Intelijen*. Jakarta: BAINTELKAM POLRI.
- Ritzer, G. (2011). *The Concise Encyclopedia of Sociology*. Oxford: Willey Publishing'.
- Sampson, R. J. (1997). Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. *Science* 277, 918-924.
- Schneider, R. H. (2007). *Crime Prevention and the Built Environment*. new York: Routledge.
- Scottish Center for Crime and Justice Research dan Universitas Glasgow . (2018). *Theories and Causes of Crime*. Glasgow: Scottish Center for Crime and Justice Research dan Universitas Glasgow .
- Search For Common Ground. (2019). *Social Cohesion Framework: Social Cohesion for Stronger Communities*. Denmark: Search For Common Ground.
- Smith, M. J., & Clarke, R. V. (2012). Situational Crime Prevention: Classifying Crime Prevention Techniques Using Enough Theory. In D. P. Farrington, *The Oxford Handbook of Crime Prevention* (pp. 291-305). Oxford: Oxford University.
- Subdit Intelijen BNPT. (2021). *Laporan Akhir Tahun 2020*. Bogor: Direktorat Penindakan BNPT.
- Sudrajat, T. (2021). Kebijakan Anti Radikalisme Melalui Kontra Radikalisasi Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers*, 208-2013.
- Sugirman, S. (2009). *Analisis Intelijen: Sebuah Kontemplasi*. Jakarta: Centre for The Study Of Intelligence And Counterintelligence.
- Sumaryani, N. M. (2020). Strategi Intelijen Dalam Penguatan Sendi-Sendi Pertahanan Negara (Studi Teks Arthasastra). *Jurnal Peperangan Asimetris*, 117-135.

- Suwartono. (2014). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogya.
- The Community Safety and Crime Prevention Council (CS & CPC). (2017). *Causes of Crime*. Ontario: The Community Safety and Crime Prevention Council (CS & CPC), .
- The Habibie Center. (2018). *Monograf Pembentukan Pembentukan Undang-Undang Terorisme* (1 ed.). Jakarta: The Habibie Center.
- The Habibie Center. (2019). *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan*. Jakarta: The Habibie Center.
- UNODC. (2020, 09 08). *Combating Terrorist Financing*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/expertise/combating-terrorist-financing.html>
- UNODC. (2022). *Sumber Intelijen Manusia dalam Operasi Rahasia (Manajemen dan Prekrutan)*. Jakarta: UNODC.
- Vision of Humanity. (2022). *Global Terrorism Index 2022*. New York: Vision of Humanity.
- Whitzman, C. (2008). *Community Safety, Gender, and Violence Prevention: Practical Planning Tools*. London: Earthscan.
- Widjajanto, A. (2021). *Tilik Data: Pola Serangan Teror di Indonesia*. Jakarta: LAB45.
- Wilson, R. E. (2018). Preventing Neighborhood Crime: Geography Matters. *NIJ Journal*, 30-36.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia: Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia volume 2*, 217-229.